

PROFIL KEMISKINAN DKI JAKARTA 2018



PROFIL KEMISKINAN DKI JAKARTA 2018



PROFIL KEMISKINAN DKI JAKARTA 2018

No. ISBN : -
No. Publikasi : 31520.1904
Katalog BPS : 3205005
Ukuran Buku : A4 (21 cm x 29,69 cm)
Jumlah Halaman : 32 + vi halaman.

Naskah: Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta

Penyunting: Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta

Desain Kover oleh: Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Sumber Ilustrasi: -

Pencetak:

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

KATA PENGANTAR

Profil Kemiskinan DKI Jakarta 2018 merupakan publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Publikasi ini berisi persentase dan karakteristik penduduk miskin serta distribusi dan ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta Tahun 2018. Data tersebut merupakan hasil pengolahan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret dan September 2018. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pengolahan data dan penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk peningkatan kualitas informasi pada publikasi serupa dimasa yang akan datang.

Jakarta, Oktober 2019

BPS Provinsi DKI Jakarta

Kepala,



BUYUNG AIRLANGGA

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
I. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penulisan.....	2
1.3 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	2
II. Metodologi.....	4
2.1 Metode Penghitungan Kemiskinan.....	4
2.2 Indikator Kemiskinan.....	7
2.3 Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan.....	8
III. Kemiskinan di DKI Jakarta.....	13
3.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan.....	14
3.2 Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.....	16
IV. Profil Kemiskinan.....	18
4.1 Perkembangan Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan.....	18
4.2 Kriteria Bank Dunia untuk Angka Kemiskinan Dki Jakarta	20
V. Profil Rumah Tangga Miskin di DKI Jakarta	22
5.1 Karakteristik Sosial Demografi.....	22
5.2 Karakteristik Pendidikan.....	23
5.3 Karakteristik Ketenagakerjaan	24
5.4 Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan).....	26
5.5 Karakteristik Pengeluaran.....	31

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di DKI Jakarta, September 2017 - Maret 2018 - September 2018	16
Tabel 4.1. Gini Ratio di Provinsi DKI Jakarta, 2014-2018	19
Tabel 5.1. Karakteristik Demografi Rumah Tangga Menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018.....	22
Tabel 5.2. Kemampuan Membaca dan Menulis Kepala Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin, 2018.....	23
Tabel 5.3. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kepala Rumah Tangga Menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin, 2018.....	24
Tabel 5.4. Sumber Penghasilan Utama Kepala Rumah Tangga menurut Rumah Tagga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018.....	25
Tabel 5.5. Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018.....	25
Tabel 5.6. Luas Lantai per Kapita menurut Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin (%), 2018.....	27
Tabel 5.7. Jenis Atap Terluas Menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018	27
Tabel 5.8. Jenis Dinding Terluas menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018.....	28
Tabel 5.9. Sumber Air Minum Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018.....	29
Tabel 5.10. Jenis Jamban Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018	30
Tabel 5.11. Status Kepemilikan Rumah menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018	30
Tabel 5.12. Jenis Pengeluaran Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018	31

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta, 2013-2018.....	14
Gambar 3.2. Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta, 2013 -2018.....	15
Gambar 3.3. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di DKI Jakarta, Maret 2013 - September 2018.....	17
Gambar 4.1. Persentase Pendapatan Kelompok Penduduk, Maret 2015 - September 2018.....	21

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi isu penting untuk negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu isu global di mana melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah disepakati untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun (Tujuan 1 SDGs). Di Indonesia, penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen resmi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019.

Sejalan dengan hal tersebut, bahkan sejak tahun 2002 yang lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1958/2002 dan diperkuat pula dengan Keputusan Gubernur Nomor 1791/2004 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk memotret wajah kemiskinan dan membantu para pengambil keputusan untuk menentukan langkah yang tepat dalam menanggulangi masalah kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. BPS mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin secara rutin. Hal

ini dapat terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Maret.

Sejalan dengan penyajian data jumlah dan persentase penduduk miskin, informasi yang tidak kalah pentingnya adalah profil kemiskinan. Informasi mengenai profil kemiskinan sangat dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk penanganan masalah kemiskinan. Publikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen/pengguna akan data dan informasi yang berkaitan dengan indikator kemiskinan. Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat miskin dapat berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan profil ini antara lain untuk:

- a. Mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018,
- b. Mengetahui karakteristik penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018,
- c. Mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018.

1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Ruang lingkup analisis mencakup tingkat kemiskinan secara regional di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018. Karakteristik penduduk miskin dan tidak miskin, distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk dan beberapa indikator kemiskinan lainnya juga disajikan dengan menggunakan data Susenas Panel Modul Konsumsi dan KOR pada Maret 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan serta sistematika penulisan. Bab II menjelaskan tentang berbagai penelitian atau metodologi yang pernah dibangun dan disajikan pada publikasi sebelumnya sekaligus diperkaya dengan hasil penelitian dan pengembangan metodologi terbaru yang sudah dipublikasikan. Bab III menjelaskan tentang kemiskinan di DKI Jakarta, perkembangan tingkat kemiskinan, perkembangan indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan, perkembangan distribusi dan ketimpangan pendapatan, Potret orang miskin di DKI Jakarta. Bab IV membahas tentang profil rumah tangga miskin dari sisi demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan tempat tinggal (perumahan).

<https://jakarta.bps.go.id>

BAB 2

METODOLOGI

2.1. Metode Penghitungan Kemiskinan

a. Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

b. Sumber Data

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret.

c. Metode

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori perkapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis

komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran).

d. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara yaitu Garis Kemiskinan periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM.

GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung adalah:

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

GKM_{jp} = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori) provinsi p.

P_{jkp} = Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p.

Q_{jkp} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.

V_{jkp} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

p = Provinsi ke-p.

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan cara mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

K_{jkp} = Kalori dari komoditi k di daerah j provinsi p

\overline{HK}_{jp} = Harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p.

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2100$$

GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kilokalori/kapita/hari.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

p = Provinsi ke-p.

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/ sub kelompok non makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/ sub kelompok non makanan terhadap total pengeluaran komoditi/ sub kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil SPDKP 2004, yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

- GKNM_{jp} = Pengeluaran minimum non makanan atau Garis Kemiskinan Non Makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.
- V_{kjp} = Nilai Pengeluaran per komoditi/ sub kelompok non makanan daerah j dan provinsi p.
- r_{kj} = Rasio pengeluaran komoditi/ sub kelompok non makanan k menurut daerah (hasil SPDKP 2004) dan daerah j (kota + desa).
- k = Jenis komoditi non makanan terpilih.
- j = Daerah (perkotaan atau pedesaan).
- p = Provinsi (perkotaan atau pedesaan).

Garis Kemiskinan merupakan Penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

- %PM_p = Persentase penduduk miskin di provinsi p.
- PM_p = Jumlah Penduduk Miskin di provinsi p.
- P_p = Jumlah Penduduk di provinsi p.

2.2. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- Pertama, *Head Count Index* (HCI-P₀), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P₁) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

- Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
- Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

α = 0,1,2

z = Garis Kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = Jumlah penduduk.

Jika $\alpha = 0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0), jika $\alpha = 1$ diperoleh indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan jika $\alpha = 2$ disebut indeks keparahan kemiskinan (P_2).

2.3. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketidakmerataan pendapatan sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum Simon Kuznets menyampaikan hipotesanya. Pareto (1897), setelah melakukan penelitian mengenai distribusi pendapatan di Eropa, mendapatkan bentuk kurvanya (untuk setiap negara) tidaklah mengikuti distribusi normal, tapi mengikuti perumusan sebagai berikut:

$$A = \frac{N}{X^b}$$

A: Jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan lebih besar dari X.

N: Jumlah penduduk total.

b: parameter yang nilainya antara 1 dan 2.

Berdasarkan hasil tersebut, Pareto menyatakan bahwa akan selalu ditemui ketimpangan dalam setiap negara, dimana kelompok penduduk terkaya mendapatkan paling banyak dari pendapatan nasional negaranya. Penemuannya ini kemudian disebut sebagai *Pareto Law*, yang menyatakan bahwa 20 persen kelompok terkaya menikmati 80 persen dari pendapatan nasional negaranya.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini dilakukan dengan pendekatan melalui data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis ini akan digunakan empat ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien Gini (*Gini Ratio*), Ukuran Bank Dunia, Indeks Theil dan Indeks -L.

a. Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus koefisien gini adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n fp_i (Fc_i + Fc_{i-1})$$

GR = Koefisien Gini.

fp_i = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i.

fc_i = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i.

Fc_{i-1} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1).

Nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendataan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks Gini adalah nol, maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi

ketidakmerataan yang sempurna. Untuk publikasi resmi Indonesia oleh BPS, baik ukuran ketidakmerataan pendapatan versi Bank Dunia maupun indeks Gini, penghitungannya menggunakan data pengeluaran.

Koefisien Gini didasarkan pada kurva Loenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform yang mewakili persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horisontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. garis diagonal mewakili pemetaan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ koefisien gini bernilai 0 yang berarti pemetaan sempurna, sedangkan jika $B=0$ koefisien gini bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Namun pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.

Daimon dan Thorbecke (1999:5) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut.

- Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis
- Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya:

- Tidak tergantung pada nilai rata - rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
- Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan

seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.

- Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
- Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat:

- Dapat didekomposisi

Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub kelompok masyarakat (sub group).

- Dapat diuji secara statistik

Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik *bootstrap* interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

b. Ukuran Bank Dunia

Bank Dunia, dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan, membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12

persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi.

- b.** Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/ sedang/ menengah.
- c.** Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah.

<https://jakarta.bps.go.id>

BAB 3

KEMISKINAN DI DKI JAKARTA

Jakarta sampai dengan hari ini masih mempunyai masalah tersendiri tentang kemiskinan dan pemerataan distribusi yang belum dapat terpecahkan. Keberadaan Jakarta sebagai ibukota negara sekaligus kota metropolitan, menjadikannya sebagai magnet bagi para pendatang, di satu sisi menawarkan gemerlap hidup di kota, sehingga menarik banyak imigran datang dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, Jakarta juga memberikan standar yang tinggi bagi para pendatang baru, dan tentunya para imigran yang datang tanpa bekal yang cukup akan segera terhimpit oleh beban hidup yang berat di Kota Jakarta.

Jumlah penduduk di Jakarta yang cenderung bertambah karena adanya arus migrasi masuk ke Jakarta yang lebih besar daripada arus migrasi keluar Jakarta, merupakan salah satu dari sumber masalah yang ada di Jakarta. Para urban yang datang ke Jakarta tidak semuanya mempunyai keahlian dan keterampilan yang khusus di bidangnya yang dapat dijadikan modal, sehingga mereka cenderung tidak mempunyai modal untuk tetap dapat hidup layak.

Banyaknya penduduk yang bermigrasi ke Jakarta menghasilkan pertambahan jumlah penduduk yang tinggi dan mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan, lahan untuk tempat tinggal serta meningkatnya jumlah kejahatan. Pada akhirnya, di balik gemerlapnya kota, Jakarta juga menyimpan wajah-wajah kemiskinan, yang merupakan efek dari pembangunan yang berlangsung.

Perkembangan tingkat kemiskinan DKI Jakarta selama kurun waktu dekade terakhir cenderung stagnan dikisaran 3-4 persen. Perlu dilakukan upaya-upaya percepatan untuk pengentasan kemiskinan sebagai tujuan akhir karena kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama. Terutama pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar dengan

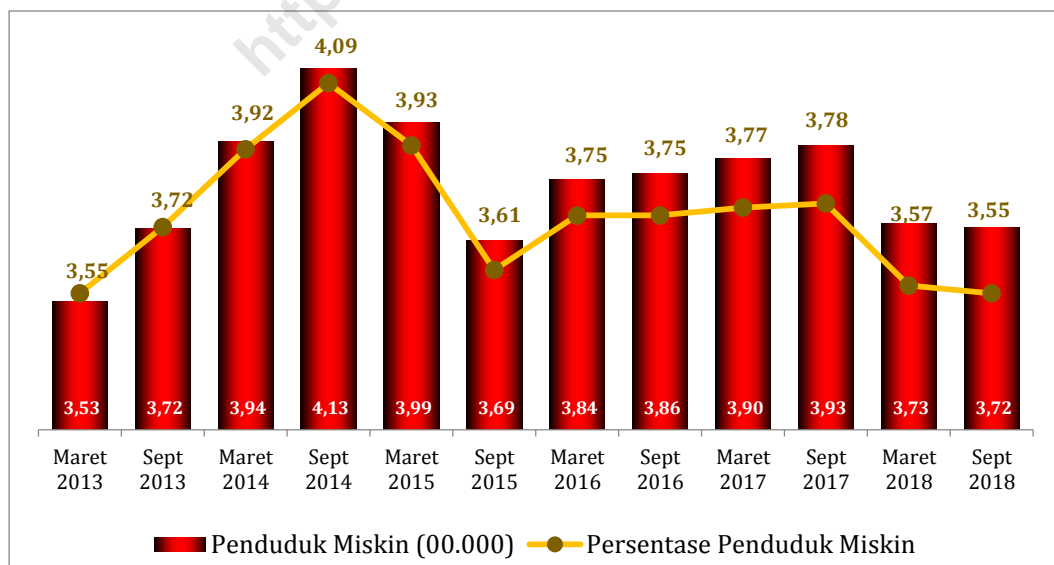
merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan strategis sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

3.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan, 2013 - 2018

Tingkat kemiskinan dapat dilihat melalui analisis tren tingkat kemiskinan. Salah satu indikator yang digunakan dalam analisis kemiskinan adalah garis kemiskinan.

Tingkat kemiskinan DKI selama beberapa tahun terakhir relatif tidak ada perubahan yang signifikan. Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 relatif tetap dikisaran angka 3-4 persen. Persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2018 mencapai 3,55 persen yang berarti mencakup sejumlah 372 ribu orang. Dibandingkan dengan Maret 2018 (3,57% atau 373 ribu orang), persentase penduduk miskin menurun 0,02 poin atau bertambah sebanyak seribu orang penduduk berkategori miskin.

Gambar 3.1. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta, 2013 - 2018

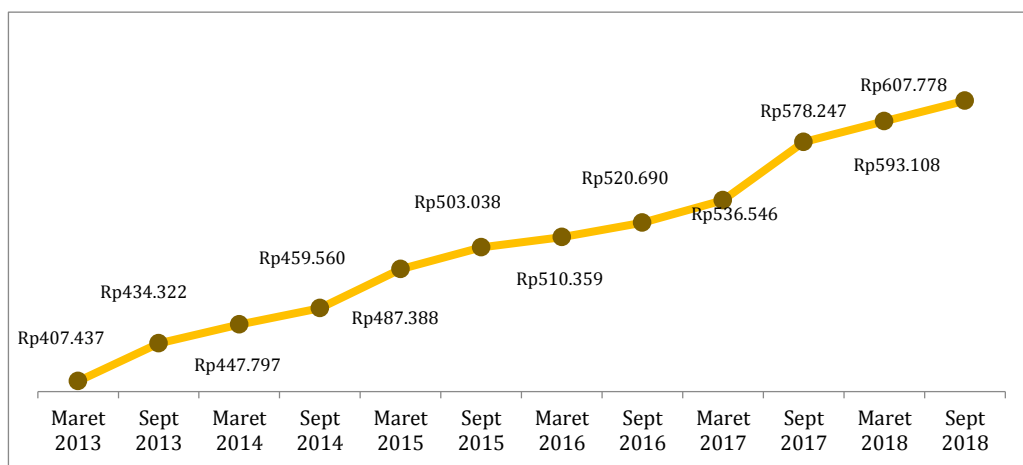


Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh besarnya Garis Kemiskinan (GK), karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan dibentuk dari komponen Makanan dan Non Makanan, yang kemudian disebut Garis Kemiskinan Makanan untuk komponen Makanan, dan Garis Kemiskinan Non Makanan untuk komponen Non Makanan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkal per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar Non-Makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Selama September 2016 - September 2017 - September 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,47 persen pada periode Maret 2018 - September 2018 (dari Rp 593.108 per kapita per bulan menjadi Rp 607.778 per kapita per bulan), dan naik sebesar 5,11 persen pada periode September 2017 - September 2018 (dari Rp 578.247 per kapita per bulan menjadi Rp 607.778 per kapita per bulan).

**Gambar 3.2. Perkembangan Garis kemiskinan
Provinsi DKI Jakarta, 2013 - 2018**



Sumber: Susenas Maret 2013 - September 2018

3.2. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Kearifan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Tabel 3.1.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P_2) di DKI Jakarta, September 2017 - Maret 2018 - September 2018

Bulan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	Indeks Kearifan Kemiskinan (P_2)
(1)	(2)	(3)
September 2017	0,612	0,149
Maret 2018	0,514	0,106
September 2018	0,503	0,107
Perubahan:		
Maret 2018 - September 2018	0,011	0,001
September 2017 - September 2018	0,109	0,042

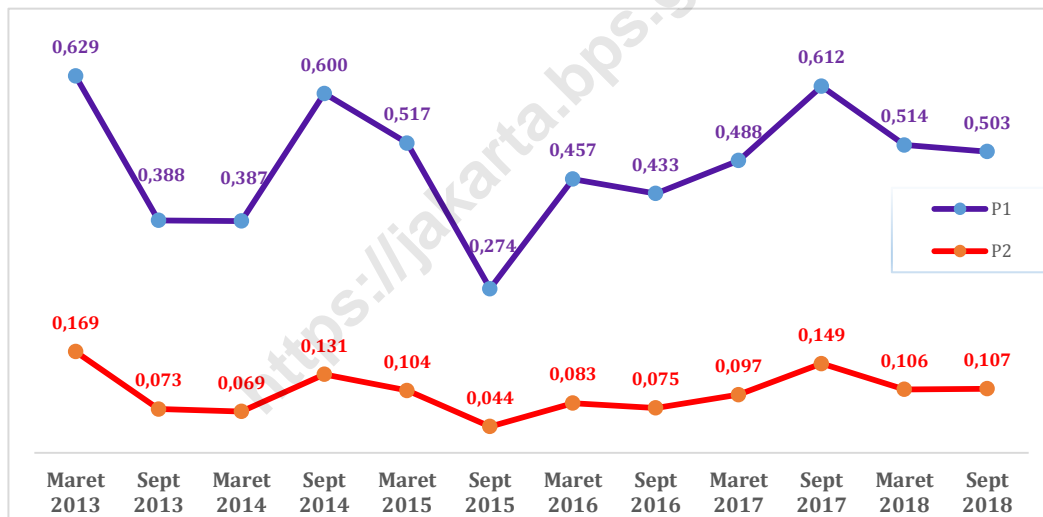
Sumber: Susenas Maret 2017 - September 2018

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index- P_1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Kearifan Kemiskinan (*Poverty Severity Index- P_2*) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2018 - September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P_2) menunjukkan

kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun sebesar 0,011 poin dari 0,514 pada Maret 2018 menjadi 0,503 pada September 2018. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan naik sebesar 0,001 poin dari 0,106 pada Maret 2018 menjadi 0,107 pada September 2018. Jika dibandingkan dengan September 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) juga mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun sebesar 0,109 poin dari 0,612 pada bulan September 2017 menjadi 0,503 pada September 2018. Begitu juga dengan Indeks Keparahan kemiskinan turun sebesar 0,042 poin, yaitu dari 0,149 pada bulan September 2017 menjadi 0,107 pada September 2018.

Gambar 3.3. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di DKI Jakarta, Maret 2013 - September 2018



Sumber: Susenas Maret 2013 - September 2018

BAB 4

DISTRIBUSI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN

Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan suatu konsep mengenai penyebaran pendapatan di antara setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Konsep pengukuran distribusi pendapatan dapat ditunjukkan oleh dua konsep pokok, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu indikator pemerataan. Pemerataan akan terwujud jika proporsi pendapatan yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu sama besarnya dengan proporsi kelompok tersebut. Alat yang lazim digunakan adalah Gini Ratio dan cara perhitungan yang digunakan oleh Bank Dunia (Hasrimi, 2010). Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Ada dua kategori tingkat kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi di mana tingkat pendapatan seorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah (Sukino, 2013).

4.1. Perkembangan Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

Gini rasio berada dalam rentang nilai 0 hingga 1, apabila semakin mendekati 1, artinya ketimpangannya semakin besar. Sedangkan nilai 0 menunjukkan ada pemerataan. Gini rasio merupakan indikator hasil

perhitungan statistik yang menggambarkan ketimpangan kekayaan masyarakat.

Secara umum angka Gini Rasio pada periode 2014-2018 di DKI Jakarta cenderung mengalami penurunan. Pada periode 2014-2018 terjadi penurunan dari 0,431 pada periode Maret 2014 menjadi 0,390 pada periode September 2018. Angka Gini Rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau semakin buruk. Penurunan angka gini rasio pada periode 2014-2018 mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin membaik (Tabel 4.1).

Tabel 4.1.
Gini Ratio di Provinsi DKI Jakarta, 2014-2018

Periode	Gini Ratio
(1)	(2)
Maret 2014	0,431
September 2014	0,436
Maret 2015	0,431
September 2015	0,421
Maret 2016	0,411
September 2016	0,397
Maret 2017	0,413
September 2017	0,409
Maret 2018	0,394
September 2018	0,390

Sumber: Susenas Maret 2014 – Susenas September 2018

Pada periode September 2018 gini ratio di Provinsi DKI Jakarta adalah 0,390, turun sebesar 0,004 poin dari periode Maret 2018. Gini ratio pada periode September 2019 merupakan gini ratio terendah sejak Maret 2014. Penurunan gini ratio secara umum menggambarkan bahwa ketimpangan

pengeluaran di masyarakat semakin kecil dari periode Maret 2014 sampai periode September 2018.

Selama periode Maret 2014 sampai periode September 2018, gini ratio terendah berada pada periode September 2018 dan gini ratio tertinggi terjadi pada periode September 2014, yaitu sebesar 0,436.

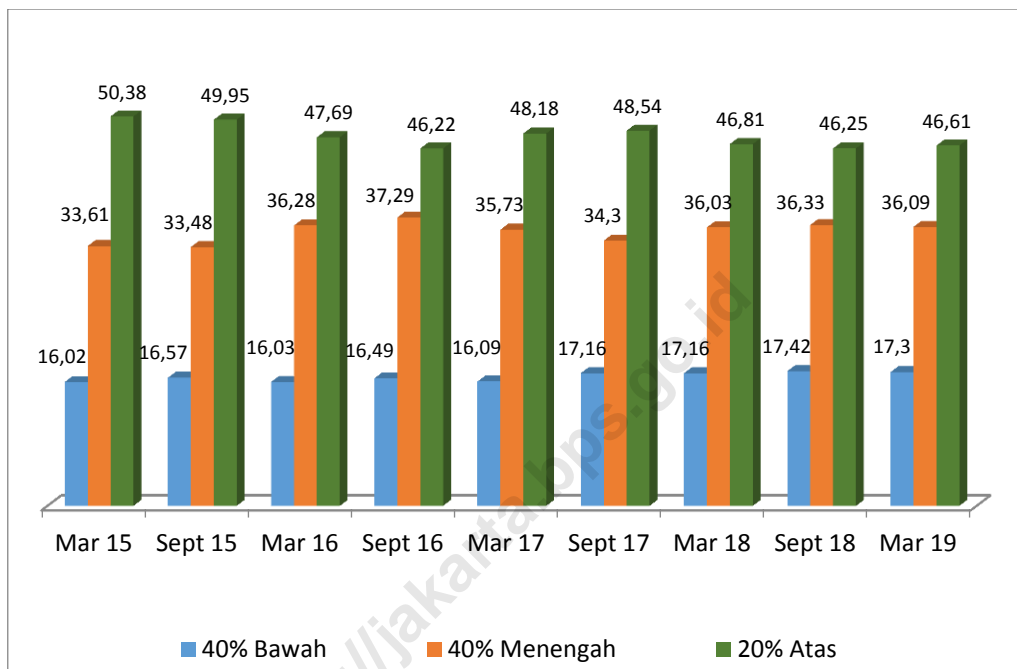
4.2. Kriteria Bank Dunia untuk Angka Kemiskinan DKI Jakarta

Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pendapatan pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Kategori ketimpangan Bank Dunia ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk di antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Berdasarkan hasil Susenas September 2018, persentase pendapatan pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,42 persen yang berarti pendapatan penduduk DKI Jakarta berada pada kategori ketimpangan rendah. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 dan September 2017 yaitu sebesar 17,16 persen.

**Gambar 4.1. Persentase Pendapatan Kelompok Penduduk,
Maret 2015 – September 2018**



<https://jakarta.bps.go.id>

BAB 5

PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN DI DKI JAKARTA

5.1. Karakteristik Sosial Demografi

Karakteristik sosial demografi yang disajikan dalam publikasi ini meliputi rata-rata jumlah anggota rumah tangga, persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga, rata-rata usia kepala rumah tangga, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Karakteristik tersebut dibandingkan dengan melihat proporsi rumah tangga miskin dan tidak miskin.

Rumah tangga miskin cenderung memiliki anggota rumah tangga lebih banyak. Sementara untuk distribusi umur, baik rumah tangga miskin dan tidak miskin memiliki kepala rumah tangga dengan rata-rata usia 47 tahun. Untuk persentase rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan sebagai kepala rumah tangga, jumlahnya cenderung lebih sedikit dibandingkan pada rumah tangga tidak miskin.

Tabel 5.1.
Karakteristik Demografi Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018

Karakteristik Rumah Tangga	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)
Jumlah Anggota Rumah Tangga	5,20	3,59
Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan	9,76	17,11
Rata-Rata Umur Kepala Rumah Tangga	47	47

Sumber: Susenas Maret 2018

5.2. Karakteristik Pendidikan

Tingkat pendidikan juga berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih rendah biasanya akan mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk menjadi miskin. Kemampuan baca tulis dan pendidikan terakhir yang ditamatkan menjadi indikator tingkat pendidikan yang dapat diamati pada rumah tangga miskin dan tidak miskin.

Kemampuan baca dan tulis tidak begitu sensitif untuk membedakan rumah tangga miskin atau bukan. Hal ini disebabkan karena berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas buta aksara telah membuahkan hasil yang baik di DKI Jakarta. Berdasarkan Tabel 5.2. nampak bahwa hampir tidak ada kepala rumah tangga miskin yang buta huruf di DKI Jakarta.

Tabel 5.2.
Kemampuan Membaca dan Menulis Kepala Rumah Tangga Menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin, 2018

Kemampuan Baca Tulis	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)
Huruf Latin	96,35	98,77
Huruf Lainnya	45,15	51,08
Huruf Latin dan Lainnya	6,43	11,50
Tidak dapat membaca dan menulis	0,60	0,50

Sumber: Susenas Maret 2018

Dari sisi pendidikan tertinggi yang ditamatkan, persentase kepala rumah tangga miskin yang berpendidikan dasar (SMP kebawah) lebih rendah dibandingkan rumah tangga tidak miskin (Tabel 5.3). Demikian juga untuk pendidikan tinggi, sedikit sekali dari rumah tangga miskin yang kepala rumah tangganya mengenyam pendidikan tinggi di DKI Jakarta.

Tabel 5.3.
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kepala Rumah Tangga menurut
Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin, 2018

Pendidikan	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)
Tidak Tamat SD	5,60	3,83
SD	18,04	13,98
SLTP	35,36	20,00
SLTA	40,65	44,90
PT	0,34	17,29

Sumber: Susenas Maret 2018

5.3 Karakteristik Ketenagakerjaan

Sumber penghasilan utama menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor sumber penghasilan utama rumah tangga dan status pekerjaan. Namun jika dilihat dari kedua tabel ini, hampir tidak ada perbedaan yang signifikan pada distribusi penduduk menurut sumber penghasilan utamanya kecuali persentase kepala rumah tangga miskin lebih banyak bekerja di sektor pengangkutan dan pergudangan sementara kepala rumah tangga miskin lebih banyak bekerja di sektor aktivitas jasa lainnya.

Tabel 5.4.
Sumber Penghasilan Utama Kepala Rumah Tangga menurut Rumah
Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018

Sumber Penghasilan Utama	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)
Tidak bekerja	18,01	18,35
Industri Pengolahan	11,16	11,40
Perdagangan besar dan eceran	15,98	19,14
Pengangkutan dan Pergudangan	15,58	10,20
Aktivitas jasa lainnya	16,38	11,81

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 5.5.
Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin
dan Tidak Miskin (%), 2018

Sumber Penghasilan Utama	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)
Tidak bekerja	18,01	18,35
Berusaha sendiri dan berusahan dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	26,96	25,16
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	1,82	2,88
Buruh/pegawai/karyawan dan pekerja bebas	53,22	53,25
Pekerja keluarga atau tidak dibayar	0,00	0,37

Sumber: Susenas Maret 2018

5.4. Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)

Penduduk miskin biasanya dikaji dalam unit rumah tangga, bukan dalam unit individu. Kemiskinan juga dianalisis dalam unit rumah tangga. Ada beberapa alasan untuk menganalisis rumah tangga miskin daripada penduduk atau individu miskin. Pertama, kemiskinan pada hakikatnya merupakan cermin keadaan ekonomi rumah tangga. Kedua, apabila ditemukan data rumah tangga miskin maka intervensi terhadap rumah tangga akan lebih efektif dibandingkan dengan intervensi kemiskinan terhadap individu yang cenderung mengarah pada pandangan bahwa orang miskin memiliki karakteristik sebagai penyebab kemiskinannya

Menurut Sudjana (1996), rumah sebagai tempat tinggal beserta fasilitasnya harus memenuhi syarat-syarat yang layak untuk mendukung kehidupan dalam rangka pembangunan dari pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pada kenyataannya untuk dapat mewujudkan rumah yang memenuhi syarat tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Indikator perumahan dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga antara lain luas lantai, dinding, sumber air, jamban, dan status kepemilikan rumah tempat tinggal.

5.4.1 Luas Lantai

Keleluasaan pribadi (*privacy*) dalam tempat tinggal menjadi salah satu indikator perumahan yang menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Keleluasaan pribadi tercermin dari luas lantai rumah perkapita (m^2) Menurut Kementerian Kesehatan, salah satu syarat rumah dikatakan sehat adalah luas lantai rumah perkapitanya minimal $8 m^2$ (BPS, 2001).

Tabel 5.6. menunjukkan bahwa masih cukup banyak rumah tangga miskin yang menempati luas lantai per kapita $\leq 8m^2$ yaitu sebesar 77,15

persen, sementara pada rumah tangga tidak miskin persentasenya sebesar 68,50 persen menempati rumah dengan luas lantai per kapita lebih dari atau sama dengan 8 m². Hal ini menunjukkan semakin sempitnya lahan dengan harga yang mampu dijangkau kalangan ekonomi menengah kebawah. Pesatnya pembangunan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan bisnis menggeser keberadaan permukiman dan membuat semakin sempitnya lahan hunian dan harga tanah yang semakin tinggi.

Tabel 5.6.
Luas Lantai per Kapita menurut Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin (%), 2018

Luas Lantai per kapita (m ²)	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)
≤ 8	77,15	31,50
8 < Luas lantai kapita ≤ 15	17,21	26,46
> 15	5,21	42,04

Sumber: Susenas Maret 2018

5.4.2 Jenis Atap

Jenis atap terluas rumah tangga miskin sebagian besar merupakan asbes, yaitu sebesar 72,28 persen. Sementara rumah tangga miskin yang atapnya dari genteng sebesar 21,73 persen dan 5,99 % atap lainnya.

Tabel 5.7.
Jenis Atap Terluas menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018

Jenis Atap Terluas	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)
Genteng	21,73	40,85
Asbes	72,28	53,58

Lainnya

5,99

5,58

Pola ini sedikit berbeda dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Distribusi rumah tangga dengan atap dari genteng dan asbes tidak berbeda secara signifikan.

5.4.3 Jenis Dinding

Berdasarkan jenis dinding terluas, sebesar 89,36 persen rumah tangga miskin dinding rumahnya terbuat dari tembok. Namun, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin yang mencapai 94,02 persen. Sementara rumah tangga miskin yang dindingnya dari kayu/papan masih ada sebesar 9,37 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Jenis dinding lainnya pada rumah tangga miskin hanya terdiri dari jenis anyaman bambu/kawat, dan nilainya sebesar 1,27 persen.

Tabel 5.8.
Jenis Dinding Terluas menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018

Jenis Dinding Terluas	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)
Tembok	89,36	94,02
Kayu/papan	9,37	5,49
Lainnya	1,27	0,49

Sumber: Susenas Maret 2018

5.4.5 Sumber air minum

Ketersediaan air bersih sebagai sumber air minum merupakan indikator perumahan yang mencirikan sehat tidaknya suatu rumah. Ketidaktersediaan air bersih juga menjadi salah satu indikasi kemiskinan.

Namun jika dilihat fakta di DKI Jakarta, rumah tangga miskin justru lebih mudah dalam mengakses sumber air minum bersih jika dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Ketersediaan sumber air bersih pada rumah tangga miskin sebesar 97,20 persen. Hal ini disebabkan oleh penggunaan air isi ulang sebagai sumber air minum relatif besar jika dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin.

Tabel 5.9.
Sumber Air Minum Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018

Sumber Air Minum	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)
Air Bersih	97,20	93,31
Lainnya	2,80	6,69

Sumber: Susenas Maret 2018

5.4.7 Jenis Jamban

Ketersediaan jamban menjadi salah satu fasilitas rumah sehat. Fasilitas jamban dibedakan atas jamban sendiri, jamban bersama/komunal, dan jamban umum/tidak ada. Persentase rumah tangga tidak miskin yang menggunakan jamban sendiri sebesar 83,60 persen lebih tinggi dibandingkan rumah tangga miskin yang sebesar 64,86 persen. Sementara persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban bersama dan jamban umum lebih banyak dibandingkan rumah tangga tidak miskin pada kategori yang sama. Hal ini berarti kepemilikan jamban merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kondisi ekonomi rumahtangga.

Tabel 5.10.
Jenis Jamban Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018

Jenis Jamban	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)
Jamban Sendiri	64,86	83,60
Jamban bersama/komunal	23,45	12,54
Jamban Umum/Tidak ada	11,68	3,86

Sumber: Susenas Maret 2018

5.4.8 Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal

Status pemilikan rumah tempat tinggal dibedakan menjadi rumah sendiri, kontrak/sewa, dan lainnya (rumah dinas, famili, bebas sewa, dan lain-lain). Berdasarkan status pemilikan rumah tempat tinggal, persentase rumah tangga miskin yang menempati rumah sendiri sebesar 33,67 persen lebih rendah dibandingkan rumah tangga tidak miskin yang sebesar 48,21 persen.

Tabel 5.11.
Status Kepemilikan Rumah menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018

Status Kepemilikan Rumah	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	33,67	48,21
Kontrak/Sewa	39,17	35,53
Lainnya	27,16	16,25

Sumber: Susenas Maret 2018

Rumah tangga miskin lebih banyak menempati rumah tinggal dengan status kontrak/sewa sebesar 39,17 dan kategori lainnya 27,16 persen.

5.5 Karakteristik Pengeluaran

Rumah tangga miskin mempunyai pola pengeluaran rumah tangga yang berbeda dengan rumah tangga tidak miskin. Rumah tangga miskin lebih banyak menghabiskan uangnya untuk memenuhi kebutuhan makanan. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel 5.12 bahwa 61,47 persen pengeluaran rumah tangga dialokasikan untuk konsumsi makanan. Kemudian jika dibandingkan besarnya pengeluarannya, rumah tangga tidak miskin mengeluarkan sebesar dua setengah kali lipat lebih besar untuk pengeluaran makanan.

Proporsi pengeluaran rumah tangga tidak miskin lebih besar dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan non-makanan. Hal ini ditunjukkan oleh Tabel 5.12 bahwa rumah tangga tidak miskin menghabiskan pengeluaran untuk makanan hanya sebesar 41,40 persen, lalu 58,60 persennya untuk kebutuhan non makanan seperti pendidikan, kesehatan, hiburan, dan lainnya.

Tabel 5.12.
Jenis Pengeluaran Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018

Jenis Pengeluaran	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)
Makanan	61,47	41,40
Non-Makanan	38,53	58,60

Sumber: Susenas Maret 2018

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jl. Salemba Tengah No 36-38 Paseban Senen Jakarta Pusat, 10440
Telepon: (021) 31928493; Fax: (021) 3152004
Email: bps3100@bps.go.id; Homepage: <http://jakarta.bps.go.id>